



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 31 /POJK.05/2016
TENTANG
USAHA PERGADAIAN

FORMAT 1 PERMOHONAN PENDAFTARAN PELAKU USAHA PERGADAIAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Pelaku Usaha Pergadaian atas nama

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dan/atau surat bukti usaha dari instansi yang berwenang;
- b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemilik kecuai koperasi;
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Dewan Komisaris;
- c. surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
- d. bukti telah melakukan kegiatan usaha; dan
- e. foto unit layanan (*outlet*) berukuran 4R/5R.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT/Koperasi/CV/Firma/UD**)/
Bentuk Lainnya***).....

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

***) Coret yang tidak perlu

***) Sebutkan

FORMAT 2 PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian Swasta:

Nama : PT/Koperasi**)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian PT/Koperasi**) termasuk perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
 - c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - 2) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 6) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa

keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

3. data pemegang saham atau anggota pendiri:
 - a. dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah warga negara Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:
 - 1) fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
 - 3) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - b) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - c) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - d) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - h) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. dalam hal pemegang saham atau anggota pendiri adalah badan hukum Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa:
 - 1) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - 2) laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan bulanan terakhir;
 - 3) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c bagi direksi; dan
 - 4) surat pernyataan bermeterai dari direksi yang menyatakan bahwa:

- a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
 - b) setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - c) tidak terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - e) tidak tercantum dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;
 - f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - g) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - h) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - i) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. dalam hal pemegang saham adalah negara Republik Indonesia, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Pergadaian; dan/atau
 - d. dalam hal pemegang saham adalah pemerintah daerah, dokumen yang dilampirkan berupa Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan Pergadaian;
4. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor, berupa:
 - a. slip setoran dari pemegang saham atau anggota pendiri ke rekening tabungan atau giro atas nama Perusahaan Pergadaian; dan
 - b. rekening koran Perusahaan Pergadaian periode mulai dari tanggal penyeteroran modal sampai dengan tanggal surat permohonan izin usaha;
 5. struktur organisasi yang memuat susunan personalia yang paling sedikit memiliki fungsi pemutus pinjaman, Penaksir, pelayanan Nasabah, dan administrasi;
 6. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
 - a. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - b. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan

- c. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
7. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 - a. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Perusahaan Pergadaian, atau perjanjian sewa gedung/ruangan disertai foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (*lay-out*) ruangan;
 - b. daftar inventaris dan peralatan kantor; dan
 - c. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir yang akan digunakan;
8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian;
9. bukti setor pelunasan biaya perizinan;
10. bukti sertifikat Penaksir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi Penaksir;
11. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bagi Perusahaan Pergadaian yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
12. pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 3 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
PERGADAIAN**

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
tanggal mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Pergadaian kepada
PT/Koperasi**), dengan ini dilaporkan bahwa kami telah memulai
kegiatan Usaha Pergadaian pada tanggal

Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami sampaikan fotokopi
Surat Bukti Gadai yang telah ditandatangani oleh perusahaan dan Nasabah.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian
Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan
kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 4 PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUSAHAAN PERGADAIAN
UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
.../POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami
mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan untuk
menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah:

Nama : PT/Koperasi*)
Izin Usaha dari OJK : Nomor..... Tanggal.....
Alamat : Jalan..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kota/Kabupaten.... Provinsi....
No Telp/Fax :
Email :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami
sampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. surat rekomendasi DPS atau bukti sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- b. daftar riwayat hidup pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- c. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan permohonan persetujuan ini, dapat menghubungi Sdr./Sdri.*), melalui alamat email.... atau nomor telepon....

Demikian permohonan ini dan atas perhatian Bapak/Ibu*) kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi*)

.....

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 5 LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai perubahan modal, sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.Modal dasar		
2.Modal disetor dan modal ditempatkan		

dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Total Nilai Saham Sebelum Perubahan (Rp)	Total Nilai Saham Setelah Perubahan (Rp)
1.			
dst.			

Adapun alasan perubahan modal tersebut adalah

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan:

- a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang yang persetujuannya telah diterima pada tanggal**);
- b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar****); dan
- c. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

***) Coret yang tidak perlu

****) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas

*****) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi

FORMAT 6 LAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN PERGADAIAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Bersama ini kami laporkan bahwa kantor pusat kami di telah kami pindahkan dengan data sebagai berikut:

Alamat lama :
Telepon :
Alamat baru :
Telepon :
Tanggal pemindahan :

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen fotokopi bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang baru dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mencantumkan alamat kantor pusat yang baru.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 7 LAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PERGADAIAN

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan mengenai nama, sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal Surat Keputusan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian	Nama Lama	Nama Baru

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang, yang persetujuannya telah diterima pada tanggal**);
2. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar****); dan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama dari Perusahaan Pergadaian yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/lbu**) untuk menetapkan perubahan keputusan OJK izin usaha dari PT/Koperasi**) kepada PT/Koperasi**)

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/lbu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu
***) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas
****) Persyaratan ini disampaikan bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi

FORMAT 8 LAPORAN PELAKSANAAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

Kepada Yth.

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan Penggabungan/Peleburan**) antara PT/Koperasi**) dan PT/Koperasi**)..... menjadi PT/Koperasi**) yang merupakan Perusahaan Pergadaian.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**);
2. akta hasil penggabungan/peleburan**) yang telah disetujui/disahkan**) oleh instansi berwenang, yang persetujuan/pengesahannya**) telah diterima pada tanggal
3. akta pendirian atas Perusahaan Pergadaian hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
4. data pemegang saham/anggota, dalam hal terdapat pemegang saham/anggota baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak/Ibu**) untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai izin usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT/Koperasi**) yang merupakan hasil Peleburan antara PT/Koperasi**) dan PT/Koperasi**)***)

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

***) Pilihan sesuai dengan bentuk badan hukum

FORMAT 9 LAPORAN PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)
Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) tanggal, telah dilakukan Pengambilalihan antara PT/Koperasi**) menjadi PT/Koperasi**) yang merupakan Perusahaan Pergadaian.

Sebagai kelengkapan data, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**);
2. akta pengambilalihan; dan
3. data pemegang saham/anggota pendiri.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

***) Coret yang tidak perlu

FORMAT 10 PELAPORAN PEMISAHAN

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/Koperasi**)

Alamat :

melaporkan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) Perusahaan Pergadaian pada tanggal telah dilakukan pemisahan PT/Koperasi**) kepada PT/Koperasi**) dan PT/Koperasi**), dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**) yang menyetujui pemisahan; dan
2. akta pemisahan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

**FORMAT 11 LAPORAN KEPAILITAN/PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PERGADAIAN**

Kepada Yth.

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami melaporkan
pembubaran:

Nama : PT/ Koperasi**)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi laporan dimaksud, bersama ini kami sampaikan
dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit atau
penetapan pembubaran; dan
2. fotokopi izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami
mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan
kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 12 PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUBARAN ATAU PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Dengan ini kami:

Nama : PT/ Koperasi**)
Alamat :
Kota
Provinsi
No. telepon/fax :
Email :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pembubaran Perusahaan Pergadaian atau permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha**).

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, terlampir bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. rancangan akta pembubaran atau rancangan akta perubahan anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru; dan
2. rencana penyelesaian hak dan kewajiban.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah
**) Coret yang tidak perlu

FORMAT 13 LAPORAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kepada Yth.
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB/Direktur IKNB Syariah*)
Gedung Menara Merdeka
Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2
Jakarta 10110

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bersama ini kami menyampaikan laporan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian, bagi:

Nama : PT/ Koperasi**)

Alamat :
Kota
Provinsi

No. telepon/fax :

Email :

Untuk melengkapi laporan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. risalah rapat umum pemegang saham/rapat anggota**);
2. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
3. bukti penyelesaian hak dan kewajiban.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
PT/Koperasi**)

.....

*) Bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ditujukan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dan bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ditujukan kepada Direktur IKNB Syariah

**) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Yuliana